

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Medan yang menyanggah status sebagai Pusat Pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang menuntut kota ini untuk terus berkembang. Seiring dengan itu tentunya dibutuhkan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Dilandasi pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kondisi sarana-prasarana infrastruktur di Kota Medan, salah satu sarana prasarana dimaksud adalah drainase. Sarana prasarana Infrastruktur drainase yang dipilih disebabkan karena pada musim penghujan daerah perkotaan seringkali terjadi banjir. Selain berstatus kota metropolitan, Medan juga menyanggah label kota tersibuk ketiga di Indonesia dalam hal aktifitas ekonomi, dagang dan dinamika penduduknya. Namun, kota penerima Piala Adipura ini masih menyimpan satu masalah serius yang sangat mengganggu, baik warga maupun pemerintah. Yaitu banjir. Cukup hujan deras satu malam, maka jalan-jalan Kota Medan pun tergenang air yang berdampak pada kerusakan jalan.

Sejak zaman kolonial Belanda, Kota Medan dijuluki sebagai Kota ‘Parijs Van Sumatera’ dimana memiliki tata ruang dan tata kota layaknya Kota Paris yang ada di Prancis. Oleh karena itu, Kota Medan memiliki reputasi sebagai kota replika dari Kota Paris yang maju baik ekonomi maupun tata kota, termasuk aman

dari gangguan banjir. Namun, kini hal itu tinggal mimpi. Banjir merendam Kota Medan di setiap kali hujan deras mengguyur.

Banjir yang melanda Kota Medan akhir-akhir ini membuat situasi menjadi gawat banjir, dan seolah tradisi tahunan dimana terus terjadi mengulangi banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Luapan air Sungai Deli setinggi 1,5 meter yang merendam sekitar 825 di kawasan Kampung Aur, kawasan Simalingkar dan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai warga Kota Medan dari dulu sampai sekarang, mungkinkah Medan bebas dari banjir? Namun, fenomena di depan mata berupa semakin meluasnya hutan beton, kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan kurangnya penanganan sungai menjadi bukti kuat penyebab banjir dan bukan mustahil kedepannya Kota Medan akan berpredikat sebagai Kota Banjir (http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/28/77224/menju_kota_medan_bebas_banjir/#.UMa6x-SZZq).

Peningkatan ekonomi, eskalasi kuantitas penduduk, menjadi pemicu utama semakin meluasnya hutan beton berupa banyaknya gedung-gedung, ruko (rumah toko) yang dibangun untuk tempat hunian maupun pusat dagang. Sungai dangkal dan disfungsi kanal juga ikut menjadi penyebab air sungai meluap. Kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) semakin membuat daya serap air semakin berkurang, belum lagi saluran drainase yang tersumbat. Jika gejala penyebab banjir tidak secepatnya ditangani secara serius, maka setiap tahun Kota Medan bakal kebanjiran setiap kali hujan deras melanda. Dan bila hal ini terjadi, maka tidak hanya rugi secara material, tetapi juga menghambat aktifitas masyarakat

untuk terus maju dan berkembang serta menjadi barometer bahwa pemerintah dan masyarakat tidak bisa mengatasi masalah banjir yang kerap kali tiap tahun datang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan sungai dalam menampung air menjadi tolok ukur terjadinya banjir. Bila debit air melebihi kapasitas sungai, maka air meluap dan mengakibatkan banjir. Banyak faktor penyebab banjir yang kian nyata menjadi penyebab vital terjadinya banjir di Kota Medan, diantaranya adalah erosi, sedimentasi, perubahan tata guna lahan, tumpukan sampah, jalur drainase, dan semakin kurangnya daya serap pepohonan diakibatkan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mengenai erosi, badan sungai secara perlahan mengalami erosi terbawa arus sungai hingga mengakibatkan sungai dangkal. Pendangkalan yang terjadi memicu menurunnya daya tampung sungai terhadap air. Hal ini mengakibatkan air meluap dan terjadilah banjir. Selain itu, perubahan tata guna lahan untuk pembangunan hutan beton berupa bangunan yang semakin padat, berujung pada semakin habisnya pepohonan dan ruang terbuka hijau untuk dialih fungsikan sebagai bangunan. Otomatis hal ini mengurangi daya serap pepohonan yang mampu menyerap air yang melimpah dari hujan deras atau air pasang yang melebihi kapasitas daya tampung sungai.

Dalam RPJMD tahun 2011 - 2015 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan empat agenda pembangunan kota sebagaimana yang telah dirumuskan, dicantumkan 24 agenda prioritas pembangunan tahun 2011 - 2015. Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum yang dihadapi, maka tidak semua prioritas tersebut menjadi prioritas tahunan dalam rencana pembangunan tahunan atau RKPD. Untuk itu, yang menjadi prioritas

pembangunan kota pada tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan tahun 2011 serta arah kebijakan umum dan strategi dan prioritas pembangunan kota tahun 2011 – 2015 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian yang mendesak dan menuntut sesegera mungkin untuk dilaksanakan, di samping berdampak luas bagi kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu agenda prioritas pembangunan kota adalah pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota khususnya di sektor kebinamargaan.

Implementasi program pembangunan drainase dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Medan berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan visi Dinas Bina Marga Kota Medan, yaitu : ”Terwujudnya Prasarana Kota Medan Metropolitan Yang Nyaman”, maka salah satu program yang dilakukan adalah meningkatkan keterpaduan dan kerjasama lintas wilayah dalam pengembangan prasarana jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air.

Kondisi drainase Kota Medan saat ini menunjukkan bahwasanya terdapat 90 titik kawasan rawan genangan dengan total kawasan rawan genangan di Kota Medan seluas 1.782 Ha. Jaringan Drainase yang ada di Kota Medan saat ini terdiri dari saluran primer sepanjang 600 km, saluran sekunder 1.700 km dan saluran tertier 800 km. Untuk Tahun Anggaran 2011, program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada Dinas Bina Marga Kota Medan sebesar Rp. 94.815.174.00,- (Dinas Bina Marga Kota Medan, 2011).

Melihat pada kondisi tersebut dan permasalahan banjir yang masih menjadi persolan bagi pemerintah Kota Medan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kebijakan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Upaya Penanggulangan Titik Genangan Air Di Kota Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses implementasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Upaya Penanggulangan Titik Genangan Air Di Kota Medan ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Upaya Penanggulangan Titik Genangan Air Di Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan proses implementasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Upaya Penanggulangan Titik Genangan Air Di Kota Medan.

- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Upaya Penanggulangan Titik Genangan Air Di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.
- b. Secara praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan drainase guna mengatasi masalah banjir di Kota Medan.

